

## Beban Administrasi Dinas Koperasi UMKM Jawa Tengah

Rimarshanda Anugrahita<sup>1</sup> Rana Tatsbita Noer<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang<sup>1,2</sup>

Email: [rimarshandanugrahita@students.unnes.ac.id](mailto:rimarshandanugrahita@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup> [rtatsbita@students.unnes.ac.id](mailto:rtatsbita@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada beban administrasi Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah, UMKM sangat berpengaruh terhadap pemasukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik penulisan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah dihadapkan pada tantangan kompleks yang terkait dengan beban administratif. Data menunjukkan bahwa sementara UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB daerah, sejumlah kendala, terutama terkait regulasi, sumber daya, dan pemanfaatan teknologi, perlu diatasi. Regulasi dan birokrasi yang kompleks menyulitkan pelaku UMKM, menandai urgensi penyederhanaan prosedur perizinan. Dengan melibatkan pihak swasta dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

**Kata Kunci:** Administrasi, Government, UMKM

### Abstract

This research focuses on the administrative burden of the Central Java Province UMKM Cooperative Service. MSMEs greatly influence the economic income and welfare of the people of Central Java. This research uses descriptive qualitative research methods with literature study writing techniques. The research results show that in efforts to support local economic growth through the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, the Central Java Province MSME Cooperative Service is faced with complex challenges related to administrative burdens. Data shows that while MSMEs contribute significantly to regional GDP, a number of obstacles, especially related to regulations, resources and use of technology, need to be overcome. Complex regulations and bureaucracy make things difficult for MSMEs, highlighting the urgency of simplifying licensing procedures. By involving the private sector and optimizing the use of information technology.

**Keyword:** Administration, Government, UMKM



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil ataupun Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.<sup>1</sup>

Usaha Mikro merupakan kegiatan yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan

<sup>1</sup> Putri, E. H. (2017). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota samarinda (studi pada dinas koperasi dan UMKM kota samarinda). *EJournal Administrasi Negara*, 5(1), 5431-5445.

ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. Mengingat peran UMKM yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi suatu daerah maka perlu adanya pemberdayaan UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberdayakan UMKM yaitu melalui pemberian fasilitas bimbingan dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Namun, kondisi UMKM di Jawa Tengah saat ini terdapat kesenjangan. Berdasarkan informasi yang dilansir dari media elektronik menyatakan bahwa UMKM saat ini menyokong hampir setengah dari perekonomian di Jawa Tengah, namun UMKM belum sepenuhnya masuk ke dalam rantai perdagangan industri besar sehingga UMKM tidak berkembang dengan cepat. Kebanyakan pemilik UMKM di Jawa Tengah masih terbatas oleh modal, kemudian keterbatasan pengetahuan warga terhadap teknologi yang ada serta sulitnya memasarkan produk. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek sehingga dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam hal ini, UMKM merupakan cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.<sup>2</sup> UMKM mampu memperluas lapangan kerja untuk memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Selanjutnya pemasalahan yang terjadi adalah beban administrasi yang terjadi terhadap Dinas Koperasi UMKM Jawa Tengah., serapan Anggaran Perbelanjaan Belanja Daerah sebesar Rp. 74.512.305.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.583.999.762. dalam hal ini dengan tingginya kuantitas dana untuk pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah membuat beban administrasi terhadap Dinas UMKM Provinsi Jawa Tengah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok "Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah". Adapun fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah:<sup>3</sup>

1. perumusan kebijakan di Bidang Kelembagaan, Pengawasan, Bina Usaha dan Pemasaran, Restrukturisasi dan Pembiayaan;
2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kelembagaan, Pengawasan, Bina Usaha dan Pemasaran, Restrukturisasi dan Pembiayaan;

<sup>2</sup> Anggana, Y. P. (2015). *Upaya pengembangan e-government dalam pelayanan publik pada dinas koperasi dan UKM Kota Malang* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

<sup>3</sup> <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik>

3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan, Pengawasan, Bina Usaha dan Pemasaran, Restrukturisasi dan Pembiayaan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentu mereka memerlukan anggaran dinas dan administrasi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat kita lihat dari peningkatan UMKM 3 tahun terakhir yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah UMKM Jawa Tengah**

No.	Jenis UMKM	2020	2021	2022
1.	<b>Produksi/Non Pertanian</b>	57.527	60.499	63.311
2.	<b>Pertanian</b>	27.653	28.284	28.357
3.	<b>Perdagangan</b>	62.083	63.965	64.707
4.	<b>Jasa</b>	20.128	20.733	20.881

Dinas Koperasi UMKM di Jawa Tengah memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola dan mendukung sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya. Beban administrasi merupakan sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh dinas ini dalam menjalankan berbagai program, layanan, dan kegiatan yang mendukung perkembangan UMKM. Beban administrasi dapat mencakup berbagai aspek, termasuk gaji pegawai, operasional harian, teknologi informasi, pelatihan pegawai, pengelolaan program dan proyek, pembiayaan umum, pemenuhan kewajiban hukum, dan promosi. Sebagai bagian dari beban administrasi, gaji dan tunjangan pegawai sebanyak 20.678 berdasarkan data menjadi rekapitulasi keragaan koperasi di Provinsi Jawa Tengah, menjadu komponen utama. mencakup biaya untuk memastikan bahwa Dinas Koperasi UMKM dapat mempertahankan staf yang berkualitas untuk menjalankan berbagai program dan layanan.

Biaya operasional harian mencakup kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan kegiatan dinas, termasuk biaya listrik, air, bahan kantor, dan perlengkapan kantor. Hal ini mendukung kelancaran operasional dan administrasi. Pada Tahun 2022 total dana operasional yang dihabiskan adalah Rp. 1.236.579. dalam hal ini tingginya biaya operasional secara administrasi disebabkan banyak cakupan program yang masih harus di maksimalkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.<sup>4</sup> Dalam era digital, penggunaan teknologi informasi menjadi penting. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sistem informasi dan teknologi informasi menjadi bagian dari beban administrasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan layanan. Pengembangan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pengembangan menjadi investasi penting. Ini membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Jika Dinas Koperasi UMKM menjalankan program atau proyek untuk mendukung UMKM, beban administrasi akan mencakup biaya pengelolaan dan pelaksanaan program tersebut, termasuk pemantauan dan evaluasi. Biaya pembiayaan umum mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti keamanan, kebersihan, dan pemeliharaan gedung kantor. Ini mendukung kenyamanan dan keberlanjutan operasional. Pemenuhan kewajiban hukum, seperti pembayaran pajak dan asuransi, menjadi bagian penting dari beban administrasi untuk

<sup>4</sup> <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/laporan-kinerja-apbd-januari-th-2023/>

memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator dan fasilitator bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai beban administrasi yang perlu diatasi agar dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Essay ini akan menjelaskan beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas UMKM Jawa Tengah serta potensi solusi untuk mengatasi beban administratif tersebut. Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah, sebagai entitas yang memainkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi daerah, dihadapkan pada sejumlah beban administrasi yang perlu diperhatikan untuk memastikan layanan yang efektif dan mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas UMKM adalah rumitnya regulasi dan birokrasi. Proses perizinan dan pelaporan yang kompleks dapat menyulitkan pelaku UMKM, memerlukan upaya maksimal dalam memahami dan mematuhi aturan. Penyederhanaan regulasi dan pemangkasan prosedur administratif yang tidak perlu menjadi kunci untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi beban administratif.<sup>5</sup> Beban administrasi juga terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja maupun anggaran. Upaya optimalisasi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya diperlukan agar Dinas UMKM dapat memberikan dukungan maksimal kepada pelaku UMKM di berbagai sektor. Tingginya beban pekerjaan, terutama terkait dengan permintaan tinggi akan layanan dari pelaku UMKM, menjadi tantangan tambahan. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas SDM dan pemikiran kreatif untuk meningkatkan efisiensi dalam penyaluran layanan.

Keterbatasan akses informasi juga menjadi hambatan, baik bagi Dinas UMKM maupun pelaku usaha. Membangun portal informasi yang terintegrasi dan mudah diakses dapat menjadi solusi untuk memperluas akses terhadap informasi terkini seputar program, pelatihan, dan peluang bisnis. Pemakaian teknologi informasi menjadi kunci dalam mengoptimalkan proses administrasi. Penggunaan aplikasi dan sistem yang terintegrasi dapat memberikan efisiensi dalam pelaporan, pemantauan program, dan pemberian layanan kepada pelaku UMKM. Keterlibatan pihak swasta dan lembaga pendidikan juga menjadi aspek penting dalam mendukung penerapan teknologi ini. Dalam menghadapi beban administrasi, Dinas UMKM juga dapat memberikan insentif kepada pelaku UMKM yang berhasil mengatasi tantangan tersebut. Pemikiran kreatif terkait program penghargaan dan subsidi dapat menjadi dorongan positif untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

Selain itu, evaluasi rutin dan umpan balik dari pemangku kepentingan menjadi landasan penting untuk mengukur efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Pendekatan inklusif yang melibatkan seluruh spektrum UMKM, termasuk yang berbasis di daerah pedesaan, akan memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan memahami dan mengatasi tantangan administratif ini, Dinas UMKM Provinsi Jawa Tengah dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Komitmen dalam reformasi dan adaptasi terhadap perubahan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi beban administratif, memajukan UMKM, dan membentuk ekosistem yang lebih dinamis dan inklusif. Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah beroperasi dalam konteks penuh tantangan dan peluang, dimana beban administrasi menjadi bagian integral dari upaya mereka untuk memajukan sektor UMKM. Data terkait jumlah UMKM, tingkat partisipasi dalam program dukungan, dan dampak ekonomi lokal memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika beban administratif yang dihadapi.

---

<sup>5</sup> Fauziah, L., Windriya, A., & Mege, S. R. (2023). Pelatihan Manajemen dan Administrasi Keuangan UMKM Menuju UMKM Unggul dan Berdayasaing. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(1), 30-37.

Menurut data terbaru, Provinsi Jawa Tengah memiliki lebih dari 3 juta unit UMKM yang berkontribusi signifikan terhadap PDB daerah. Sementara itu, tingkat partisipasi UMKM dalam program-program dukungan yang diselenggarakan oleh Dinas UMKM masih perlu ditingkatkan. Hanya sekitar 30% dari total UMKM yang aktif mengikuti pelatihan dan program pengembangan yang ditawarkan oleh dinas. Faktor beban administratif seperti kompleksitas perizinan dan birokrasi telah menjadi kendala utama. Data menunjukkan bahwa lebih dari 50% pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memahami regulasi yang berlaku, yang menyebabkan penundaan dalam pengajuan perizinan. Sumber daya terbatas, baik dari segi tenaga kerja maupun anggaran, juga tercermin dalam data. Dinas UMKM hanya memiliki rata-rata 1 pegawai untuk setiap 500 UMKM, yang menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia.<sup>6</sup> Meskipun telah ada upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi, data menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% UMKM yang aktif menggunakan aplikasi atau sistem berbasis teknologi dalam operasional mereka. Kendala ini menggarisbawahi tantangan dalam memperkenalkan inovasi teknologi dan memastikan adopsi yang lebih luas di kalangan UMKM. Penggunaan data dan analisis kebutuhan UMKM dapat membantu Dinas UMKM menyusun strategi yang lebih tepat dan responsif. Menyediakan lebih banyak pelatihan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM dapat meningkatkan tingkat partisipasi dalam program dukungan.

Sumber daya yang terbatas menunjukkan urgensi untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Berdasarkan data tersebut, Dinas UMKM dapat merancang program pelatihan yang fokus pada peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam mengelola beban administratif sehari-hari. Melalui pendekatan inklusif, Dinas UMKM dapat mengatasi tantangan administratif dengan lebih efektif. Data partisipasi UMKM berbasis wilayah dapat membantu dalam merinci strategi yang lebih khusus untuk daerah-daerah yang mungkin menghadapi kesulitan lebih besar dalam mengakses layanan dukungan. Dengan menganalisis data dan merespons secara cerdas terhadap kebutuhan dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah dapat memperbaiki layanannya, merancang program yang lebih efektif, dan memastikan bahwa beban administratif yang dihadapi oleh pelaku UMKM dapat dikelola dengan lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

## KESIMPULAN

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah dihadapkan pada tantangan kompleks yang terkait dengan beban administratif. Data menunjukkan bahwa sementara UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB daerah, sejumlah kendala, terutama terkait regulasi, sumber daya, dan pemanfaatan teknologi, perlu diatasi. Regulasi dan birokrasi yang kompleks menyulitkan pelaku UMKM, menandai urgensi penyederhanaan prosedur perizinan. Dengan melibatkan pihak swasta dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, Dinas UMKM dapat memperbaiki aksesibilitas dan memastikan pelaku UMKM lebih mudah memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku. Kesimpulannya, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah perlu mengadopsi pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan dan dinamika UMKM di wilayahnya. Mengintegrasikan perubahan berbasis data, merampingkan regulasi, dan memperkuat kapasitas internal akan membantu mengelola beban administratif, meningkatkan partisipasi UMKM dalam program dukungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta

---

<sup>6</sup> Handayani, N. L. P. (2022). E-Commerce Sebagai Penunjang Ekonomi Digital di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(1), 9-14.

menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berdaya saing bagi UMKM di Provinsi Jawa Tengah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggana, Y. P. (2015). *Upaya pengembangan e-government dalam pelayanan publik pada dinas koperasi dan UKM Kota Malang* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Fauziah, L., Windriya, A., & Mege, S. R. (2023). Pelatihan Manajemen dan Administrasi Keuangan UMKM Menuju UMKM Unggul dan Berdayasaing. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(1), 30-37.
- Handayani, N. L. P. (2022). E-Commerce Sebagai Penunjang Ekonomi Digital di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(1), 9-14.
- <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik>
- <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/laporan-kinerja-apbd-januari-th-2023/>
- Putri, E. H. (2017). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota samarinda (studi pada dinas koperasi dan UMKM kota samarinda). *EJournal Administrasi Negara*, 5(1), 5431-5445.